

**PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)  
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH  
DAERAH DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada  
Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**SUCI ANGGUN SARI**

**NIM. 12030115120071**

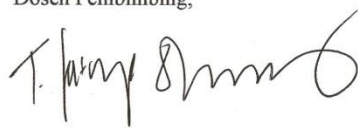
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Suci Anggun Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120071  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA:  
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG**  
Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt.,Ph.D

Semarang, 15 April 2019  
Dosen Pembimbing,



(Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E.,Akt.,Ph.D.)  
NIP. 19711026 200003 1001

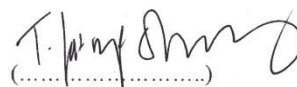
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Suci Anggun Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120071  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH AKUNTABILITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT  
KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI  
INDONESIA: STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juni 2019

Tim Penguji:

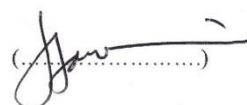
1. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt., Ph.D

  
(.....)

2. Surya Raharja, S.E, M.Si, Ph.D., CA.

  
(.....)

3. Andrian Budi Prasetyo, S.E. M.Si., Akt., C.A., C.A.A.T.

  
(.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Suci Anggun Sari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 April 2019  
Yang membuat pernyataan,

(Suci Anggun Sari)  
NIM : 12030115120071

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) didasarkan pada hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang terdiri dari sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 175 pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Batang khususnya yang bekerja dibagian akuntansi atau keuangan, dari total 175 kuesioner sebanyak 125 kuesioner kembali dan 120 kuesioner dapat diolah. Terdapat 2 hipotesis yang diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dapat menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kata kunci : akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat korupsi pemerintah daerah.

## **ABSTRACT**

*This study aims to test empirically the effect of local government financial reports accountability (LKPD) to the level of corruption in local government. Local government financial reports accountability (LKPD) based on the results of the inspection of the financial report by BPK that consists of a system of internal control and compliance with laws and regulations. Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 175 employes of local government unit (SKPD) Semarang Regency specifically at financial/accounting departement. A total of 175 questionnaires 125 were returned and 120 can be procesed. There are two hypotheses that were tested by using multiple regression analysis. The results of the analysis showed that the internal control system (SPI) that can effectively reduce the level of corruption. Meanwhile, compliance with the regulations does not affect to the level of corruption.*

*Keyword : accountability of local government financial reports, internal control systems, compliance with laws and regulations, the level of local government corruption*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon, they shine when it's their time.

*Unknown*

Good things come to those who **believe**, better things come to those who are **patient** and the best things come to those who **don't give up**.

*Unknown*

But Allah is your protector, and He is the best helpers.

*Q.S Ali 'Imran: 150*

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

Ibu dan Bapak tersayang

Kakak tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha-Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Batang** ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D selaku ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Puji Harto S.E., M.si., Akt., Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan saran serta petunjuk selama masa studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, S.E., M.Si., Akt.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi ini.



5. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.si., Akt. Selaku dosen mata kuliah Kajian dan Riset Akuntansi yang telah mengajarkan serta memotivasi mahasiswanya dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai pengajaran dan nasehat selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Fakultas Ekonomika dan Binis Universitas Diponegoro yang telah memberikan berbagai bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Winarti dan Bapak Subiyono. Terimakasih sudah berjuang membesarkan dan selalu memberikan yang terbaik serta telah memberikan motivasi dan dukungan dalam segala bentuk serta doa-doa dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kakak kandung beserta kakak ipar penulis. Terimakasih karena selalu ada dan telah membantu ketika dimintai pertolongan serta terima kasih atas dukungan beserta doa-doa dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ketiga keponakan penulis, Adam, Alisya, dan Affan. Terima kasih sudah menjadi penyemangat serta penghibur ketika penat dalam penyusunan skripsi.
11. Keluarga besar penulis, bulik Sih, Om Maryo, Bulik Yuni, Om Dodo, Bulik Witri, Om Sofyan, Bulik Rita, Om Kokok serta para sepupu penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Teman sekaligus sahabat dari SMP penulis yaitu, Dian, Anisa, dan Mbak Ima yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta

telah bersedia berteman dengan penulis selama bertahun-tahun tanpa pamrih.

13. Teman sekaligus sahabat dari SMA penulis yaitu, Asa, Bunga, Mbak Qon, Ika Unni, Putri, Dilla, serta Tia yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta telah menjadi bagian cerita saat remaja dari penulis.
14. Teman sekaligus sahabat di bangku perkuliahan, Melinda, Dewi, Yesi, Mutiara, Alfa, Bella, Unni Jaymes, Mutia, Titis, Anin, Ponco, Ammy, Ivan, Elsa, Dendi, Iqbal, Irsyad serta sahabat-sahabat lainnya yang berjuang bersama dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
15. Rekan-rekan seperjuangan bimbingan skripsi yaitu Sadewa, Christopher, Dhea, Louisa, dan Khadafy.
16. Teman-teman KKN Tim II Desa Duren, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung: Mas Surya, Ajeng, Nur, Meity, Hafshah, Putri, dan Mas Akmal, terima kasih atas pembelajaran hidup dan kebersamaannya.
17. Seluruh teman-teman seangkatan Akuntansi 2015, terima kasih sudah menemani, membantu dan belajar bersama-sama selama 4 tahun masa perkuliahan.
18. Para sahabat di Graha Melonita, mba Emma, mba Rida, dan Mila terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan banyak membantu penulis selama hidup di Semarang.

19. Kak Dewi sahabat di Twitter penulis, terimakasih telah menghibur dan memberikan semangat serta menjadi tempat berkeluh kesah ketika penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi dan menyiapkan ujian akhir.
20. Semua pihak yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat.

Semarang, 15 April 2019

Suci Anggun Sari

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	11
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4    Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1    Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	12
2.1.1 Teori <i>Fraud Triangle</i> .....	12
2.1.2 Teori Perkembangan Moral .....	13
2.1.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	15
2.1.4 Korupsi.....	24
2.1.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .....	30
2.2    Penelitian Terdahulu .....	33
2.3    Kerangka Pemikiran.....	35

2.4	Hipotesis .....	37
2.3.1	Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Tingkat Korupsi .....	37
2.3.2	Hubungan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Tingkat Korupsi.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Variabel Penelitian .....	41
3.1.1	Klasifikasi Variabel.....	41
3.1.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.2	Populasi dan Sampel .....	47
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	50
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5	Metode Analisis Data .....	51
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	51
3.5.2	Uji Kompetensi Data .....	51
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	52
3.5.4	Analisis Regresi Berganda.....	53
3.5.5	Pengujian Hipotesis .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>		<b>56</b>
4.1	Objek Penelitian .....	56
4.2.	Hasil Analisis Data.....	59
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	59
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data.....	62
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3	Uji Hipotesis .....	67
4.3.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	67
4.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	68
4.3.3	Uji signifikansi Paramater Individual (Uji t) .....	69
4.4	Interpretasi Hasil Uji Hipotesis .....	71
4.4.1	Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	71

4.4.2	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>76</b>
5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Keterbatasan .....	77
5.3	Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Pengukuran Sistem Pengendalian Internal (SPI) .....	43
Tabel 3.2 Pengukuran Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan .....	45
Tabel 3.3 Pengukuran Tingkat Korupsi .....	46
Tabel 3.4 Sampel Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Rincian Jumlah Kuesioner .....	57
Tabel 4.2 Rincian Responden Penelitian .....	58
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	59
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Presepsi tentang Tingkat Korupsi .....	60
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Presepsi tentang Sistem Pengendalian Internal .....	61
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Presepsi tentang Tingkat Korupsi .....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Presepsi tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) .....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas .....	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	68
Tabel 4.15 Hasil Uji Signifikansi simultan .....	68
Tabel 4.16 Hasil Uji Parameter Individual .....	70
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Fraud Triangle</i> .....	12
Gambar 2.2 Ukuran Akuntabilitas Berdasarkan Hasil audit BPK-RI.....	18
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian .....	82
Lampiran B Hasil Output SPSS .....	88
Lampiran C Data Responden .....	99
Lampiran D Surat Rekomendasi Penelitian .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memasrahkan kewenangan daerah otonom guna mengatur dan mengurus hajat masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat selaras dengan kebijakan perundang-undangan.

Pada dasarnya, desentralisasi merupakan misi utama otonomi daerah (Mardiasmo, 2009). Harapannya, dua manfaat nyata akan dihasilkan melalui desentralisasi, yaitu: pertama, masing-masing daerah mampu memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia sehingga dapat mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan pada seluruh daerah. Kedua, peosisi pengambilan ketentuan publik bergeser pada jenjang pemerintah yang paling rendah serta mempunyai laporan paling lengkap guna memperbaiki alokasi sumber daya produktif (Shah, dalam Mardiasmo,2009). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya otonomi daerah telah banyak terjadi kasus-kasus korupsi terungkap dan terjadi di daerah (Heriningsih, 2014).

Terjadinya kasus korupsi di daerah khususnya di Jawa Tengah cukup memprihatinkan. Ketua Bidang Korupsi Politik dan Anggaran, Komite Penyelidik

Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Ronny Maryanto (2017) mengatakan selama kurun waktu 1999-2017, kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi di Jawa Tengah berjumlah 32 (25 September 2017).

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Jawa Tengah adalah hanya sebagai contoh dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah, yang kemungkinan terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan pusat ke daerah.

Tindak kejahatan korupsi, membuat masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mewujudkan *good governance* atau yang biasa didefinisikan sebagai suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa serta merupakan salah satu upaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (Arja Sadjiarto, 2000). Arie Soelendro menyatakan, unsur-unsur utama upaya perwujudan *good governance* ini yaitu keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Upaya konkret dalam aktualisasi akuntabilitas serta transparansi pemanfaatan keuangan pemerintah daerah, diperlukan pengungkapan laporan pertanggungjawaban berwujud laporan keuangan. Hal ini selaras dengan pernyataan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

melalui suatu media pertanggungjawaban (berupa laporan keuangan) yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks organisasi sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agents* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). *Information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya

penyelewengan atau korupsi oleh *agent* (pemerintah). Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerja sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*. Pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diawasi (*checks and balances*) untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin baik akuntabilitas suatu pemerintah daerah berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry* dan semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah (*agent*).

Seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, pemerintah daerah memiliki akses langsung atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD sehingga dapat menyebabkan *information asymmetry* yang berujung pada terjadinya tindakan korupsi. Untuk mencegah terjadinya *information asymmetry* yang berujung pada tindakan korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi kinerja keuangan yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Parwanto dan Harto, 2017). Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan BPK RI (Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006.

Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI diharapkan terciptanya kondisi yang kondusif dan akan mudah mengidentifikasi adanya kecurangan. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh BPK terdiri dari opini audit, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan secara teoritis berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah (Heriningsih, 2014).

Opini audit BPK RI terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (*unqualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini kedua yaitu, Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*qualified opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini yang ketiga yaitu Opini Tidak Wajar atau TW (*Adverse opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini yang keempat yaitu, pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat atau TMP (*disclaimer opinion*) menyatakan bahwa

laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan (Heriningsih, 2014).

Selain opini audit, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Hasil evaluasi SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang dapat diklasifikasikan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian internal yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah dan akan meningkatkan peluang korupsi (Heriningsih, 2014).

Komponen terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang banyak ditemukan ketidaktaatan, maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi (Heriningsih, 2014).

Terkait dengan tingkat korupsi pada pemerintahan daerah, Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang patut untuk dikaji, karena pada saat kepemimpinan

Yoyok Riyo Sudibyo periode 2012-2017, Kabupaten Batang mengalami perkembangan yang pesat atas reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberantas korupsi. Prestasi Kabupaten yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam upaya untuk memberantas korupsi diantaranya adalah: *pertama*, Pemerintah Kabupaten Batang merupakan daerah dengan urutan terendah dalam penyimpangan anggaran se-Jateng menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran pada Tahun 2013. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Batang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berupa penghargaan Kinerja Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Batang masuk pada peringkat 10 Nasional dari 114 Pemkab dan kota se-Indonesia yang dievaluasi (Ahmad, 2017). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batang di bawah kepemimpinan Wihaji dan Suyono berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut menjadikan Kabupaten Batang meraih dua kali berturut-turut yaitu pada tahun 2016 dan 2017 (26 Mei 2018).

Menurut Heriningsih (2014) jika pemerintah daerah memperoleh opini WTP maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah dan korupsi tidak terjadi. Selain opini audit, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga berpengaruh terhadap tingkat korupsi secara teoritis (Heriningsih, 2014).

Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka korupsi yang terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang. Namun, pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari sulitnya mencari dan menggali informasi tentang



pentingnya peran akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi (Kurniawan, 2009). Secara empiris pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap korupsi di pemerintah daerah di Indonesia juga belum diteliti.

Berdasarkan paparan diatas, mengenai Kabupaten Batang yang memiliki berbagai prestasi dalam memberantas tindakan korupsi dan mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017, penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan teori yang dinyatakan oleh Heriningsih (2014) bahwa akuntabilitas laporan keuangan yang dinilai oleh BPK dan terdiri atas opini audit, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pemerintahan Kabupaten Batang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang mengenai teori yang disampaikan oleh Heriningsih (2014) bahwa akuntabilitas laporan keuangan yang didasarkan atas hasil audit BPK yang terdiri atas opini audit, sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh tingkat kelemahan sistem pengendalian internal laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kabupaten Batang.

2. Menguji pengaruh tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kabupaten Batang.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana mendeteksi tindakan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Batang melalui:

Uji pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mendeteksi tingkat korupsi di pemerintah daerah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi baru atas penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas laporan keuangan daerah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian diharapkan dapat menjadi dasar alasan mengapa suatu instansi khususnya instansi pemerintah daerah perlu memperhatikan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam prakteknya memberantas korupsi yang terjadi di pemerintah daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini, dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi lima bab.

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai telaah pustaka sebagai dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Dalam bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

**BAB IV****HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian.

**BAB V****PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian mendatang.